

Interaksi Antar *Stakeholder* dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

disusun sebagai tugas akhir guna mendapat gelar sarjana Strata 1
Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik



disusun oleh:

Mufarichatush Sholihah

16/394524/SP/27130

Dosen Pembimbing:

Dr. Bevaola Kusumasari, S.I.P., M.Si.

Program Studi S1 Manajemen dan Kebijakan Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

2019

Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Nama : Mufarichatush Sholihah
No. Mahasiswa : 16/394524/SP/27130
Judul : Interaksi Antar Stakeholder dalam Tim Penjangkau
Penanganan Anak Jalanan di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Tanggal Ujian : 10 Juni 2020
Tempat : Ruang Sidang Departemen Manajemen dan Kebijakan
Publik



Tim Penguji
Ketua Tim/Dosen Pembimbing

Bevaola

Dr. Bevaola Kusumasari, S.I.P., M.Si.
19760520 200212 2 002

Penguji I

Mmd

Prof. Dr. Muhadjir Muhammad Darwin, M.P.A.
19521231 197903 1 034



Penguji II

Phil

Dr. Phil Gabriel Lele, S.I.P., M.Si.
19740914 200212 1 002

Pernyataan Bebas Plagiasi

7/28/2020

CETAK KHS

Diisi oleh Mahasiswa | UGM-SP-FORM1601 UJIAN SKRIPSI | FO-002/FO-008



UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Sosio Yusticia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Tlp. (0274) 563362, 542382, Fax. (0274) 563362 Ext. 222
<http://www.fisipol.ugm.ac.id> e-mail: sekdeksp@ugm.ac.id

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUFARICHATUSH SHOLIAH
NIM : 16/394524/SP/27130
Tahun terdaftar : 2016
Program Studi : Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)
Fakultas/Sekolah : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan Demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2020



MUFARICHATUSH SHOLIAH

Dipindai dengan CamScanner

Halaman Persembahan

hal terpenting dalam mengusahakan dan mencapai sesuatu
bukanlah cepat atau lambat,
tetapi konsisten.

ada pelangi setelah ada hujan.
terkadang akan ada kecewa
dari usaha-usaha yang telah penuh,

percayalah.

segala hal terjadi untuk suatu alasan
yang akan disyukuri kemudian
juga terjadi karena kehendak serta izin Allah SWT
teruslah berjalan dan jangan pernah berhenti berjuang.

Ku persembahkan karya skripsi ini
untuk orang-orang yang kucintai:
Orang tuaku,
Keluargaku,
Sahabatku,
Temanku,
dan diriku sendiri.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dalam bentuk artikel jurnal dengan judul “**Interaksi Antar Stakeholder dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**”. Artikel jurnal ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Tulisan ini tidak akan terbentuk tanpa dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, dan doa yang tidak berhenti mengalir. Dengan rendah hati, terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Keluarga saya, khususnya Bapak-Ibuk; Pakpuh-Simbok; Pakpuh Cici-Bupoh Cici. Terima kasih untuk segalanya, kasih sayang, doa-doa serta dukungannya untuk Ayik. Ayik yakin Pakpuh & Pakpuh Cici bahagia di surga terbaikNya menyaksikan Ayik telah menyelesaikan kuliah ini dengan baik. Terima kasih juga untuk Mas Alfian, Mbak Fitri, Dek Wardah, dan Dek Alvin untuk semangat dan perhatiannya.
2. Ibu Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat. Semoga Bu Ola sehat dan bahagia selalu.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadjir Darwin dan Bapak Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan mengarahkan tulisan ini ke arah yang lebih baik. Semoga Pak Muhadjir dan Pak Gaby sehat serta bahagia selalu.
4. Bapak-Ibu Dosen Departemen MKP Fisipol UGM atas segala ilmu yang bermanfaat. Semoga Bapak-Ibu Dosen sehat dan bahagia selalu.
5. Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fisipol UGM serta Departemen MKP UGM terutama Mbak Yuli yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis, semoga sehat dan bahagia selalu.
6. Seluruh anggota Tim Penjangkau meliputi Dinas Sosial DIY, Satuan Polisi Pamong Praja DIY, IPSM DIY, Komunitas Taabah, Panti HAFARA, Rumah Anak Indonesia, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rumah Singgah Anak Mandiri, Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro, Yayasan Indriya Nati, dan Yayasan Rumah Impian yang telah membantu penulis memperoleh informasi saat proses pengambilan data. Semoga Bapak-Ibu-Mbak-Mas sehat dan bahagia selalu.

7. Mangrove alias Mila, Vatin, dan Hanum. Saksi perjalanan skripsi sejak awal hingga akhir. Terima kasih untuk selalu ada. Bersama-sama kita hadapi kehidupan yang semakin kompleks dan dewasa ini. Aku sayang kalian.
8. Bestieku si Putri, terima kasih untuk selalu mendengarkan segala sambatanku dan saling sabar menghadapi, juga mendukung satu sama lain. Fari sayang Putri.
9. Mantu Idaman alias Vika dan Sukma. Terima kasih untuk saling mendengarkan dan mendukung satu sama lain. Mari bersama kejar mimpi kita masing-masing. Aku sayang kalian.
10. Sahabat SMA alias Anggi, Krisma, Mila, dan Hanum. Terima kasih untuk saling mendukung dan mendoakan. Masa SMA tentu sangatlah kita rindukan bukan? Meski kita semakin menua, saat berkumpul bersama rasanya seperti masih SMA. Aku sayang kalian.
11. Sobi SMA alias Dinda, Mila, Ira, Sukma, dan Hani. Terima kasih untuk saling mendukung dan mendoakan. Aku sayang kalian.
12. Si Anggi sahabat senja. Terima kasih untuk saling mendukung, menguatkan, dan mendoakan. Iceh sayang Anjie.
13. Bestie Sasa, terima kasih untuk selalu mendengarkan juga saling mendukung dan mendoakan. Mari hadapi kompleksnya kehidupan ini dengan jalani aja. Fari sayang Sasa.
14. Sahib SMA lainnya: Zarra, Ichak, Aulia, Rifda, Rendi, dan Della. Terima kasih untuk saling mendukung dan mendoakan. Aku sayang kalian.
15. Sedeng people alias Anggi, Riri, Anggun, Tya, dan Ghea. Terima kasih untuk saling mendukung dan mendoakan. Aku sayang kalian.
16. Sobi SMP, Citra, terima kasih untuk saling mendukung dan mendoakan. Iceh sayang Citra.
17. Sisterku alias Tirra, Ancha, Audi, dan Wardah. Terima kasih untuk saling mendukung dan mendoakan. Aku sayang banget.
18. Sahabat kesayangan alias Dewi, April, dan Iin. Terima kasih untuk saling mendukung, menguatkan, dan mendoakan. Masa kuliah tak akan berkesan tanpa kalian. Mari bersama raih segala cita-cita kita. Aku sayang kalian.
19. Bestieku Lita terima kasih dalam segala hal saling mendukung, menguatkan, dan mendoakan satu sama lain. Icha sayang Litu.

20. Sobiku si Arisa dan Suci, terima kasih untuk saling mendukung dan mendoakan. Masa kuliah tak akan menyenangkan tanpa kalian. Icha sayang kalian.
21. Sobi MKP lainnya: Arini, Nadia, Brili, Kalista, Riska, Widya, Luvilla, Ulfa, Wulan, Niken, Septi, Sekar, Arum, dan Latika. Terima kasih untuk saling mendukung dan mendoakan. Masa kuliah tak akan menyenangkan tanpa kalian. Icha sayang kalian.
22. Farisa bestieku, terima kasih untuk saling mendukung dan mendoakan. Fari sayang Farisa.
23. Sobi Kelas Auditku alias Dina, Fera, dan Fia. Terima kasih untuk saling mendukung dan mendoakan. Icha sayang kalian.
24. Teman-teman KKN KS-006 yang telah memberikan dukungan dan doa-doa. Terima kasih untuk berjuang dan berproses bersama membentuk tim KKN kita. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu.
25. Untuk siapa saja yang telah hadir memberikan dukungan serta doa-doa. Terima kasih, semoga sehat selalu dan dilimpahkan kebahagiaan.

Segala bentuk dukungan sangatlah berarti bagi penulis. Penulis mohon maaf dengan setulus hati, penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, Juli 2020

Penulis,

Mufarichatush Sholihah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Halaman Persembahan	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
Abstrak	1
A. PENDAHULUAN	2
B. METODE PENELITIAN	4
C. KERANGKA TEORI ATAU KERANGKA KONSEP	5
D. HASIL DAN PEMBAHASAN	8
E. PENUTUP	13
DAFTAR PUSTAKA	14

Interaksi Antar *Stakeholder* dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

The process of policy implementation on handling street children in the Special Region of Yogyakarta Province involves various government and non-government stakeholders and joined in a special coordination team called Tim Penjangkau. Tim Penjangkau is the special coordination team formed by Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 concerning the Protection of Children Living on the Street. This research highlights the interaction between stakeholder of Tim Penjangkau handling street children in the Special Region of Yogyakarta Province. This research has, thus, discovered stakeholders involved, the pattern of interaction between stakeholder, role and stakeholder collaboration. This research used the qualitative method with a case study approach. Data were collected through the semi-structured interview techniques. Interviews were conducted with all members of Tim Penjangkau consisting of Dinas Sosial DIY, Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat DIY, Komunitas Taabah, Panti HAFARA, Rumah Anak Indonesia, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rumah Singgah Anak Mandiri, RSB Diponegoro, Yayasan Indriya Nati, and Yayasan Rumah Impian. These results found that good coordination and cooperation are exist among stakeholders supported by the deflation trends in the number of street children in the Special Region of Yogyakarta Province from 2010 to 2019. It shows that Tim Penjangkau can strengthen the handling of street children in the Special Region of Yogyakarta Province.

Keywords: *Street Children, Interaction Between Stakeholder, Role of Stakeholder.*

Abstrak

Proses pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan di Provinsi DIY melibatkan berbagai *stakeholder* pemerintah maupun non-pemerintah dan tergabung dalam tim koordinasi khusus yakni Tim Penjangkau. Tim Penjangkau merupakan tim koordinasi khusus yang dibentuk sesuai amanat Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Penelitian ini berupaya menjelaskan interaksi antar *stakeholder* dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi DIY. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait *stakeholder* yang terlibat serta pola interaksi antar *stakeholder* yang mencakup peran dan kerjasama *stakeholder*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap seluruh anggota Tim Penjangkau yang beranggotakan Dinas Sosial DIY, Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat DIY, Komunitas Taabah, Panti HAFARA, Rumah Anak Indonesia, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rumah Singgah Anak Mandiri, RSB Diponegoro, Yayasan Indriya Nati, dan Yayasan Rumah Impian. Terdapat adanya kerjasama dan koordinasi yang berjalan dengan baik di antara *stakeholder*. Didukung dengan tren penurunan anak jalanan di Provinsi DIY pada Tahun 2011-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Tim Penjangkau mampu memperkuat penanganan anak jalanan di Provinsi DIY.

Kata kunci: *Anak Jalanan, Interaksi Antar Stakeholder, Peran Stakeholder.*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi faktor pendorong bagi anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi (Akarro & Mtweve, 2011). Hal ini dikarenakan anak-anak dalam kondisi kemiskinan tersebut menanggung kewajiban atau membantu orang tua mereka untuk mencari nafkah. Anak jalanan adalah seseorang dengan kondisi dimana jalanan telah menjadi tempat tinggal dan keluarga bagi mereka serta dengan situasi tidak adanya perlindungan, pengawasan, atau arahan dari orang dewasa yang bertanggung jawab (UNICEF (1986); dalam Dabir & Athale, 2011).

UNESCO Institute for Statistics (2018) memperkirakan terdapat sekitar 150 juta anak di jalanan di dunia. Anak-anak ini memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan di jalan untuk mencari nafkah seperti mengemis, menyemir sepatu, dan menjual barang kecil (UIS, 2018). Beberapa dari mereka berada di jalan dan kemudian kembali ke keluarga mereka, sementara yang lain hidup sepenuhnya di jalan tanpa terhubung dengan keluarga mereka (Crombach & Elbert, 2014).

Anjal termasuk ke dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimana seseorang atau keluarga dengan sebab suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya serta tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar (Dinsos DIY, 2019). Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial ataupun perubahan lingkungan yang kurang mendukung atau kurang menguntungkan.

Kriteria anak jalanan antara lain: anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab, anak yang melakukan aktivitas di jalanan, anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu (Dinsos DIY, 2019).

‘Di dunia jutaan anak hidup dan mati di jalanan pada setiap harinya’ (Pemberton, 2007; dalam Dabir & Athale, 2011). Anjal mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya. Suyatna et al (2015) menjelaskan bahwa anjal menghadapi berbagai masalah seperti tidak mendapat waktu istirahat yang cukup, sering mendapat makanan, mendapat kekerasan fisik, dan sering mendapat pelecehan seksual.

Anak jalanan menjadi salah satu agenda pada urusan sosial dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY, 2015). Pemda DIY secara khusus telah mengatur anak jalanan dengan menetapkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Proses pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan di Provinsi DIY melibatkan berbagai *stakeholder* dan tergabung dalam tim koordinasi khusus yang dibentuk sesuai amanat Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 yakni Tim Penjangkau Anak Jalanan. Data anak jalanan di Provinsi DIY Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 25.25% dan penurunan dengan rata-rata sebesar 46.17%. Mayoritas dari anjal tersebut justru berasal dari luar DIY dan berulang turun ke jalanan (Dinsos DIY, 2019).

Implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu kebijakan (Akib, 2010). Proses implementasi kebijakan publik yang melibatkan berbagai *stakeholder* memerlukan adanya kerjasama antar aktor yang berjalan dengan baik (Purwanto, 2012). Kerjasama antar aktor terbangun melalui koordinasi serta interaksi di antara mereka. Interaksi antar *stakeholder* yang terlibat mempunyai andil dalam penurunan angka anak jalanan. Penurunan angka anak jalanan bergantung pada proses penanganan anak jalanan dimana ditentukan oleh kerjasama yang baik di antara *stakeholder* yang terlibat. Interaksi adalah suatu peristiwa

dimana terdapat dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kemudian menciptakan suatu hasil serta adanya komunikasi satu sama lain (Argyle, 2017). Melihat adanya kecenderungan penurunan pada angka anak jalanan di Provinsi DIY sejak tahun 2011, diindikasikan bahwa terdapat kerjasama serta interaksi antar *stakeholder* dalam Tim Penjangkau penanganan anak jalanan berjalan dengan baik.

Penelitian-penelitian terkait dengan anak jalanan sudah banyak dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Fawzie & Kurniati (2012), Purwoko (2013), dan Astri (2014) yang membahas terkait kondisi serta permasalahan yang dihadapi anak jalanan. Widodo (2000) membahas tentang kebijakan penanganan anak jalanan dilihat dari perspektif anak jalanan. Penelitian ini berupaya untuk mengisi celah yang ada dengan melakukan penelitian terkait anak jalanan dilihat dari perspektif *stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan penanganan anak jalanan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan maka pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Interaksi Antar *Stakeholder* dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi DIY?”. Dengan adanya Tim Penjangkau ini apakah mampu memperkuat atau malah memperlemah penanganan anak jalanan di Provinsi DIY. Penelitian ini akan mengungkapkan terkait penanganan anak jalanan di Provinsi DIY meliputi *stakeholder* yang terlibat serta pola interaksi antar *stakeholder* yang mencakup peran dan kerjasama *stakeholder*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami fenomena lebih mendalam. Pendekatan studi kasus dipilih untuk menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif terkait berbagai aspek yang mencakup individu, kelompok, program, atau situasi sosial (Anggito & Setiawan, 2018). Pendekatan studi kasus dapat berfokus pada suatu individu, organisasi, proses lingkungan sekitar, institusi, atau suatu kejadian. Dalam studi kasus, peneliti mengkaji terkait dengan mengapa sesuatu dapat terjadi, bagaimana implementasinya, dan apa yang dihasilkan dari sesuatu yang terjadi tersebut (Creswell et al., 2015).

Penelitian ini berfokus pada permasalahan anak jalanan di Provinsi DIY. Penelitian ini mencoba memahami terkait interaksi antar *stakeholder* dalam Tim Penjangkau penanganan anak jalanan di Provinsi DIY. Penelitian dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang dilakukan dari bulan November 2019 hingga Januari 2020. Terdapat beberapa tantangan dalam proses pengambilan data seperti kesepakatan waktu pelaksanaan wawancara yang memakan waktu cukup lama dikarenakan bertepatan dengan libur akhir dan awal tahun. Syarat wawancara yang berbeda-beda pada setiap *stakeholder* menjadi tantangan yang memberikan kesan tersendiri bagi peneliti karena menjadi lebih memahami setiap *stakeholder*, dengan begitu peneliti juga dapat memahami serta mengenal anak jalanan lebih mendalam.

Data primer yang digunakan berupa dokumentasi hasil wawancara dalam bentuk transkrip wawancara. Wawancara dilakukan terhadap seluruh anggota Tim Penjangkau yang beranggotakan Dinas Sosial DIY, Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat DIY, Komunitas Taabah, Panti HAFARA, Rumah Anak Indonesia, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rumah Singgah Anak Mandiri, RSB Diponegoro, Yayasan Indriya Nati, dan Yayasan Rumah Impian.

C. KERANGKA TEORI ATAU KERANGKA KONSEP

Pemangku kepentingan atau *stakeholder* adalah pihak yang terpengaruh oleh suatu kebijakan dan pihak yang mempengaruhi suatu kebijakan (Freeman, 1984; dalam Reed et al., 2009). Bryson (2004) menjelaskan bahwa *stakeholder* adalah individu, kelompok, atau organisasi yang mempunyai perhatian atas sumberdaya atau dipengaruhi oleh hasil organisasi tersebut. Secara umum, *stakeholder* dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang mempunyai perhatian dan kepentingan terhadap suatu program atau kegiatan.

Diperlukan identifikasi *stakeholder* untuk melihat keterkaitan berbagai pihak dalam sebuah kebijakan publik. Hal ini dikarenakan *stakeholder* mempunyai pengaruh besar terhadap keberlangsungan sebuah kebijakan (Vedung, 2017). *Stakeholder* menentukan sebuah pola hubungan dan kualitas dari sebuah kebijakan. Lebih lanjut guna melihat bagaimana peran dan kinerja mereka dalam sebuah kebijakan yang berkaitan dengan keberhasilan suatu kebijakan serta pengelolaan kebijakan selanjutnya. Kinerja dan peran *stakeholder* yang maksimal akan menghasilkan kebijakan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

Stakeholder dibagi menjadi tiga kelompok (Crosby, 1992; dalam Alviya et al., 2016). Pertama, *stakeholder* utama (*primary stakeholder*) merupakan *stakeholder* yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun negatif serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Kedua, *stakeholder* pendukung (*secondary stakeholder*) adalah *stakeholder* yang tidak mempunyai keterkaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek tetapi mereka mempunyai kepedulian serta keprihatinan yang besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholder* pendukung menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian suatu kebijakan. Ketiga, *stakeholder* kunci (*key stakeholder*) mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masalah, kebutuhan, dan perhatian atas keberlangsungan serta kelancaran suatu kegiatan. Mereka mempunyai kewenangan secara legal dalam proses pengambilan keputusan.

Analisis *stakeholder* adalah identifikasi terhadap *stakeholder* sebuah proyek serta penilaian terhadap minat dan cara mereka yang digunakan untuk evaluasi perkembangan *stakeholder* (Ackerman & Eden, 2011). Analisis *stakeholder* merupakan suatu pendekatan untuk menilai sebuah faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap proyek dan minat *stakeholder* terhadap permasalahan yang berkaitan dengan konflik kepentingan antar *stakeholder*.

Analisis *stakeholder* yang lebih khusus untuk menunjukkan sebuah pola hubungan dan interaksi yang terjadi antar *stakeholder* dapat digunakan pendekatan 4R yakni *rights*, *responsibilities*, *revenues*, dan *relationships* (Salam & Noguchi, 2006; dalam Zubayr et al., 2014). *Rights* (hak) adalah hak yang dimiliki *stakeholder*. *Responsibilities* (tanggung jawab) adalah kewenangan, kewajiban, dan tugas-tugas *stakeholder*. *Revenue* (pendapatan) adalah manfaat atau keuntungan yang diperoleh *stakeholder*. *Relationships* (hubungan) adalah hubungan interaksi antara dua orang atau lebih. Hubungan positif terjadi jika interaksi kedua pihak saling berhubungan dan tidak menimbulkan konflik. Hubungan negatif terjadi jika salah satu pihak merasa dirugikan serta menimbulkan adanya konflik.

Dalam implementasi suatu kebijakan yang melibatkan berbagai *stakeholder* diperlukan kerjasama antar aktor untuk menciptakan sinergitas yang baik melalui koordinasi dan interaksi (Purwanto, 2012). Purwanto (2012) juga menjelaskan bahwa seluruh *stakeholder* perlu memahami mekanisme kerja agar koordinasi berjalan dengan baik.

Purwanto (2012) menjelaskan terdapat empat mekanisme kerja yang menjelaskan mengenai pola hubungan interaksi antar *stakeholder*. Pertama, mekanisme kerja mengutub (*pooled*) adalah ketika suatu kebijakan melibatkan berbagai organisasi atau aktor dengan

satu kelompok sasaran tertentu pada proses implementasinya. Masing-masing *stakeholder* tidak saling bergantung, tetapi mempunyai peran serta keluaran kebijakan untuk kelompok sasaran yang sama. Pola hubungan ini memerlukan interaksi minimal antar aktor. Koordinasi yang dilakukan hanya sebatas pembagian kerja antar aktor pada masa awal implementasi. Kemudian masing-masing aktor menjalankan tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan tugas masing-masing.

Kedua, mekanisme kerja berkaitan (*sequential*) yang melibatkan banyak aktor dalam proses implementasinya serta mempunyai kelompok sasaran tertentu. Dalam menjalankan tugas dan kepentingannya, terdapat hubungan saling ketergantungan antar aktor. Mekanisme kerja berkaitan ini menghasilkan pola *input-output*. *Output* yang dicapai oleh organisasi atau aktor pertama merupakan *input* bagi organisasi atau aktor kedua dan juga seterusnya. Kerjasama dan koordinasi antar aktor sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan mekanisme ini. Tingkat keberhasilan mekanisme ini juga dipengaruhi oleh hasil kinerja dengan *input* bagi aktor lain.

Ketiga, mekanisme kerja timbal balik (*reciprocal*) adalah proses implementasi suatu kebijakan yang melibatkan banyak aktor dan menyerahkan kelompok sasaran kepada satu aktor pada eksekusi terakhir suatu kebijakan. Pola interaksi dalam mekanisme ini yakni masing-masing aktor menghasilkan *output* yang akan menjadi *input* bagi aktor lainnya.

Keempat, mekanisme kerja *single agency* yang terjadi pada organisasi yang bersifat tunggal dan tidak mempunyai pola interaksi atau kinerja yang spesifik. Seluruh hal yang dilakukan oleh seluruh aktor diolah oleh satu organisasi atau aktor yang akan berperan dalam proses implementasi kebijakan. *Input* dan *output* merupakan hasil dari proses identifikasi yang dilakukan terhadap kelompok sasaran.

Anak jalanan merupakan anak dengan usia lima hingga delapan belas tahun yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau menghabiskan sebagian besar waktunya berada di jalanan (Dinsos DIY, 2019). UNICEF (1986) dalam Dabir dan Athale (2011) mendefinisikan anak jalanan sebagai seseorang yang mempunyai kondisi dengan jalanan sebagai tempat tinggal dan keluarga bagi mereka serta situasi tanpa adanya perlindungan, pengawasan, atau arahan dari orang dewasa yang bertanggung jawab. UNICEF (1986) mengkategorikan anak dalam situasi sulit tersebut menjadi tiga, yakni *children on the street*, *children of the street*, dan *abandoned children*.

Children on the street merupakan anak yang berada di jalanan tetapi masih mempunyai keluarga. *Children on the street* turun ke jalanan untuk bekerja membantu perekonomian keluarganya yang memiliki kondisi kurang baik. Anak dalam kategori ini turun ke jalanan pada siang hari untuk bekerja dan beraktivitas dan kembali pada keluarganya pada malam hari. *Children of the street* adalah anak yang menghabiskan sebagian besar atau seluruh waktunya di jalanan. *Children of the street* mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarganya bahkan tidak lagi mempunyai keluarga. *Children of the street* turun ke jalanan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya serta tinggal di jalanan sebab tidak mempunyai tempat tinggal atau keluarga untuk kembali. *Abandoned children* adalah anak yang telah terpisah atau sengaja dipisahkan oleh keluarganya. *Abandoned children* turun ke jalanan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya karena tidak lagi mempunyai tempat tinggal. Anak dalam kategori *abandoned children* menganggap jalanan adalah rumah sehingga biasanya mempunyai hubungan yang erat dengan anak jalanan lain di lingkungannya.

Penyebab anak turun ke jalanan adalah karena faktor ekonomi atau kemiskinan, permasalahan perpecahan keluarga, dan urbanisasi (Friberg & Martinsson, 2017). Kemiskinan adalah kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Suharyanto dalam Syawie, 2011). Kemiskinan menyebabkan anak terpaksa turun ke jalanan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta membantu orang tua mencari nafkah. Anak turun ke jalanan dapat juga disebabkan karena permasalahan perpecahan keluarga (Friberg & Martinsson, 2017). Permasalahan perpecahan dalam keluarga dapat menimbulkan adanya potensi anak dijadikan sebagai pelampiasan atas permasalahan yang sedang terjadi. Hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak sehingga anak menjadi tertekan. Kondisi tersebut kemudian cenderung menyebabkan anak lebih memilih untuk turun ke jalanan. Urbanisasi dapat menyebabkan seseorang menghadapi situasi yang sulit di kota tujuan. Kondisi perekonomian yang sulit tersebut dapat menyebabkan mereka untuk turun ke jalanan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keberadaan anak jalanan menjadi tersingkirkan dari tatanan kehidupan bermasyarakat. Kondisi anak dalam situasi jalanan membuat anak jalanan tidak memiliki kehidupan normatif seperti yang lain (Emilie, 2009). Istilah yang sering muncul terhadap anak jalanan antara lain eksploitatif, rentan, dan marjinal. Emilie (2009) menjelaskan bahwa anak jalanan termarjinalkan. Anak jalanan menjadi tersingkirkan dan kurang dihargai karena pekerjaannya. Selain itu, anak jalanan cenderung eksploitatif sebab mereka mempunyai *bargaining position* yang lemah. Anak jalanan hidup di jalanan dengan kondisi yang rentan dan kelangsungan hidupnya tidak terjamin. Anak jalanan juga sering menggunakan strategi untuk bertahan hidup yang berbahaya dan berisiko. Anak jalanan rentan menjadi korban tindak kekerasan baik fisik maupun psikologis. Bahkan kekerasan sudah dianggap sebagai hal yang wajar di lingkungan mereka (Dutta, 2018). Anak jalanan juga tidak mempunyai jaminan pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak anaknya terutama pada aspek kesehatan dan pendidikan. Bahkan mereka juga rentan terhadap perilaku menyimpang seperti yang berkaitan dengan alkohol serta obat-obatan terlarang dan seks bebas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan penanganan anak jalanan di DIY telah diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan dengan dilahirkannya Tim Penjangkau. Kegiatan penanganan anak jalanan di Provinsi DIY berfokus pada reunifikasi terhadap keluarga serta hak untuk memperoleh pendidikan. Reunifikasi bermaksud bahwa sebisa mungkin anak dikembalikan kepada pihak keluarga, apabila masih mempunyai keluarga. Jika tidak mempunyai keluarga, maka anak akan tinggal di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Anak yang mempunyai keluarga akan diberikan *assessment* sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan bimbingan pola asuh terhadap keluarganya. Anak yang putus sekolah diberikan motivasi agar tumbuh keinginan untuk bersekolah serta pemahaman terhadap pentingnya bersekolah dan tidak ada untungnya jika terus menerus berada di jalanan. Kegiatan sekolah dapat ditempuh anak dengan cara formal pada sekolah yang dikelola pemerintah maupun informal pada sekolah alam.

Kegiatan penanganan anak jalanan meliputi sapaan dan penjangkauan, pemberian *assessment*, dan pemantauan. Tim Penjangkau melakukan sapaan dan penjangkauan setiap dua minggu sekali pada sembilan titik. Penjangkauan pada anak dilakukan berkali-kali tergantung pada sasaran. Ada beberapa anak yang mau diberikan *assessment* dengan satu kali sapaan, ada juga yang memerlukan lebih dari dua atau tiga kali penjangkauan untuk percaya kepada Tim Penjangkau. Tim Penjangkau juga melakukan pemantauan kebenaran informasi pada anak jalanan yang dijangkau melalui anak jalanan yang telah menjadi anak binaan. Sebab tak jarang anak jalanan yang memberikan informasi yang tidak jujur atau sebenar-benarnya.

Setelah dilakukan sapaan dan penjangkauan, Tim Penjangkau membuat laporan keadaan sapaan dan penjangkauan yang akan dibahas pada rapat koordinasi rutin yang diadakan setiap dua minggu sekali. Apabila pada proses sapaan dan penjangkauan ditemukan kasus khusus yang bersifat kompleks atau urgent, diadakan *Case Conference*.

Pada rapat koordinasi rutin ditetapkan tindak lanjut penanganan anak jalanan atau biasa mereka sebut dengan *assessment*. Tindak lanjut penanganan anak jalanan ini dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, *assessment* apa yang mereka butuhkan dan dengan siapa akan mendapatkan *assessment*. Anak yang memerlukan binaan lebih mendalam akan diberikan binaan yang bersifat dalam panti. Anak dengan kebutuhan binaan ringan mendapatkan binaan yang bersifat luar panti. Tim Penjangkau juga akan melakukan monitoring terhadap perkembangan anak jalanan bahkan hingga anak sudah berhasil 'mentas' dari situasi jalanan.

Kerjasama dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi DIY

Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi DIY melibatkan berbagai *stakeholder*. Pemangku kepentingan atau *stakeholder* adalah orang-orang atau kelompok yang terkena pengaruh dari pelaksanaan suatu program atau memberikan pengaruh terhadap hasil suatu kegiatan atau program (Reed et al., 2009). Tim Penjangkau melibatkan berbagai *stakeholder* baik pemerintah maupun non-pemerintah. *Stakeholder* pemerintah yang terlibat adalah Dinas Sosial DIY dan Satpol PP DIY. *Stakeholder* non-pemerintah terdiri dari IPSM DIY, Komunitas Taabah, Panti HAFARA, Rumah Anak Indonesia, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rumah Singgah Anak Mandiri, Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro, Yayasan Indriya Nati, dan Yayasan Rumah Impian.

Kerjasama dan koordinasi yang baik merupakan kunci keberhasilan dari suatu kebijakan melalui interaksi antar aktor yang terlibat di dalamnya (Purwanto, 2012).

Kordinasi dapat berjalan dengan baik apabila seluruh *stakeholder* yang terlibat memahami mekanisme kerja yang melibatkan seluruh *stakeholder*.

Kerjasama yang terjalin dalam Tim Penjangkau mempunyai mekanisme kerja berkaitan (*sequential*) dimana melibatkan banyak aktor serta memiliki kelompok sasaran tertentu. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Purwanto, 2012), pada mekanisme kerja berkaitan (*sequential*) ini terdapat hubungan saling ketergantungan antar masing-masing *stakeholder* dalam menjalankan tugas serta kepentingan. Mekanisme kerja berkaitan membentuk pola *input-output* dengan *output* yang dihasilkan oleh organisasi atau aktor pertama akan menjadi *input* bagi organisasi atau aktor kedua dan seterusnya. Tingkat keberhasilan mekanisme kerja berkaitan bergantung pada kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* serta hasil kinerja yang menentukan *input* bagi aktor lain.

Dinas Sosial DIY melaporkan rekomendasi penjemputan kepada Satpol PP DIY yang kemudian akan menjadi *input* bagi Satpol PP DIY untuk merespon rekomendasi Dinas Sosial DIY dengan melakukan penjemputan. Satpol PP DIY tidak dapat melakukan penjemputan tanpa ada surat rekomendasi dari Dinas Sosial DIY. Begitu pula dengan Dinas Sosial DIY tidak dapat melakukan penjemputan sendiri karena kewenangan penjemputan terdapat pada Satpol PP DIY. Setelah dilakukan penjemputan, Satpol PP DIY melakukan penyerahan kepada Dinas Sosial DIY yang kemudian akan diberikan *assessment* oleh Dinas Sosial DIY dengan anggota lain Tim Penjangkau. Satpol PP DIY tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan *assessment* terhadap anak jalanan.

Anak yang akan diberikan kegiatan *assessment* menjadi *input* bagi IPSM DIY, Komunitas Taabah, Panti HAFARA, Rumah Anak Indonesia, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rumah Singgah Anak Mandiri, Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro, Yayasan Indriya Nati, dan Yayasan Rumah Impian. Selain itu, mereka melakukan kegiatan penjangkauan rutin secara bersama-sama. Dalam hal ini, mereka saling membutuhkan satu sama lain mulai dari kegiatan penjangkauan rutin, rapat koordinasi rutin, pemberian *assessment*, hingga monitoring terhadap anak.

Mereka mempunyai kegiatan rutin untuk pertemuan setiap dua minggunya dan juga grup dalam media sosial untuk membahas penanganan anak jalanan ini. Ketika dilakukan sebuah penemuan atau urgensi terkait anak jalanan, mereka segera menyampaikan dan akan segera dibahas bersama untuk tindak lanjut. Kegiatan dilakukan bersama-sama mulai dari sapaan anak jalanan, penjangkauan anak jalanan, pemberian *assessment*, pembahasan reunifikasi, dan pembahasan *Case Conference*. Kegiatan bersama-sama ini menciptakan ketergantungan satu sama lain untuk usaha mencapai tujuan bersama serta kesepakatan bersama dari adanya kepentingan yang berbeda-beda. Kegiatan pemantauan terhadap data terkait anak jalanan juga saling dikomunikasikan satu sama lain. Diluar tugas penjangkauan, mereka sering melakukan penjangkauan dan mencari kepastian informasi. Hal ini disebabkan karena informasi dari anak jalanan yang terkadang tidak jujur. Tim Penjangkau melakukan penjangkauan dan sapaan dengan pendekatan sebagai 'teman' anak jalanan. Dengan pendekatan tersebut, anak jalanan akan lebih mudah didekati dan dicari informasinya.

Koordinasi berjalan dengan baik dimana mereka mempunyai kepentingan yang berbeda dengan tujuan yang saling terkait. Kepentingan Dinas Sosial DIY melakukan penanganan serta pencegahan anak yang hidup di jalan sesuai dengan amanat Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011. Sedangkan kepentingan Satpol PP DIY yakni menjalankan tugas menjaga ketertiban umum dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan. Kepentingan IPSM DIY yakni mewujudkan jogja istimewa yang indah dan nyaman dalam

artian bebas dari pandangan anak jalanan, menegakkan hukum bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam aktivitas di jalanan, serta membantu pemerintah dalam penanganan anak jalanan yang mengedepankan sisi sosial.

Komunitas Taabah sebagai anggota dalam Tim Penjangkau mempunyai kepentingan yakni memperluas jaringan dalam mendukung pengembangan anak bahwa setiap anak jalanan butuh perlindungan. Panti HAFARA mempunyai kepentingan pengentasan kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan serta kontribusi terhadap program penanganan anak jalanan oleh pemerintah. Rumah Anak Indonesia mempunyai kepentingan menjalin jaringan yang luas dengan lembaga-lembaga lain serta penanganan anak jalanan sehingga dapat menjadi pribadi yang mandiri.

Kepentingan Rumah Singgah Ahmad Dahlan yakni melakukan pendampingan dan memperjuangkan taraf hidup anak serta saling membutuhkan untuk bekerja sama. Kepentingan Rumah Singgah Anak Mandiri yakni mewujudkan kesejahteraan anak jalanan melalui pendampingan dan perlindungan hak-hak anak, mendorong dan memberikan kesadaran kepada masyarakat luas akan penting dan perlunya menghargai hak-hak anak terhadap tumbuh kembang anak, serta saling membutuhkan dalam pemberian informasi dan data.

Kepentingan RSB Diponegoro yakni terbantunya anak jalanan dalam pengembangan aktualisasi diri mempersiapkan masa depan yang lebih baik serta agar mudah mendapatkan izin operasional dan akses terhadap bantuan sosial anak. Kepentingan Yayasan Indriya Nati yakni berusaha mengurangi jam anak di jalanan serta kegiatan yang sama yakni saling membantu dalam menjalankan program penanganan anak jalanan. Kepentingan Yayasan Rumah Impian yakni transformasi kehidupan anak jalanan melalui impian yang berdampak bagi sesama dengan #thestreetisnot4kids dan “*Solidarity, Care, and Transform*”, program penjangkauan yang sama, serta ingin mengajak teman-teman lembaga lain untuk memberikan pendekatan yang ramah anak.

Mereka menganggap anak binaan tidak dikotak-kotakkan pada satu organisasi saja, tetapi anak binaan bersama. Dengan adanya Tim Penjangkau ini, mereka lebih merasa terintegrasi satu sama lain serta data anak jalanan menjadi lebih akurat. Sebelumnya, mereka merasa berlomba-lomba dalam melakukan penanganan anak jalanan sehingga menyebabkan adanya data anak jalanan yang bersifat rangkap serta banyak data yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Selain itu, mereka jadi lebih terarah dalam melakukan penanganan dan juga lebih memahami dinamika anak jalanan di Provinsi DIY. Informasi yang mereka dapatkan dan juga berikan menjadi lebih jelas dengan bersama-sama dalam Tim Penjangkau. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antar *stakeholder* dalam Tim Penjangkau dengan kerjasama serta koordinasi yang berjalan dengan baik.

Tindakan dan Peran Masing-Masing *Stakeholder* dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi DIY

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peran masing-masing *stakeholder* sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mekanisme kerja berkaitan ini. Untuk mengidentifikasi peran sehingga berkaitan dengan pola hubungan dan interaksi yang terjadi antar *stakeholder* dapat digunakan pendekatan 4R yakni *rights, responsibilities, revenues*, dan *relationships* (Salam & Noguchi, 2006; dalam Zubayr et al., 2014). Tanggung jawab dan hubungan menjadi poin terpenting karena paling relevan dengan hasil temuan penelitian. Berkaitan dengan faktor utama untuk melihat interaksi yang terjadi serta aktor yang terlibat yakni peran atau tanggung jawab serta hubungan antar *stakeholder*.

Masing-masing *stakeholder* mempunyai peran dan tugas yang telah ditetapkan. Dinas Sosial DIY mempunyai posisi sebagai koordinator. Dengan anggota antara lain Satpol PP DIY, IPSM DIY, Komunitas Taabah, Panti HAFARA, Rumah Anak Indonesia, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rumah Singgah Anak Mandiri, Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro, Yayasan Indriya Nati, dan Yayasan Rumah Impian.

Dinas Sosial DIY sebagai koordinator berperan dalam mengadakan pertemuan koordinasi rutin, proses pengambilan keputusan, mengadakan *Case Conference*, reunifikasi luar dan dalam daerah, penentuan penerima bantuan sosial, membuat keputusan akhir, serta memberikan *assessment*. Satpol PP DIY sebagai anggota berperan dalam melakukan penjemputan, berpartisipasi dalam pertemuan koordinasi rutin, dan berpartisipasi dalam *Case Conference*. IPSM DIY, Komunitas Taabah, Panti HAFARA, Rumah Anak Indonesia, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rumah Singgah Anak Mandiri, Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro, Yayasan Indriya Nati, dan Yayasan Rumah Impian berperan dalam pemberian *assessment*, penjangkauan rutin, berpartisipasi dalam pertemuan koordinasi rutin, mengajukan *Case Conference*, serta mengajukan rekomendasi penjemputan.

Program oleh Dinas Sosial DIY mencakup bantuan dana operasional, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), pemenuhan kebutuhan dasar anak, bimbingan-bimbingan sosial, reunifikasi, serta pemenuhan hak-hak anak terhadap identitas diri sekaligus jaminan sosial kesehatan dan pendidikan. Program yang dilakukan oleh Satpol PP DIY yakni melalui himbauan larangan pemberian kepada anak jalanan dengan baliho dan penegakan aturan terkait gangguan ketertiban umum. Program IPSM DIY adalah sapaan dan penjangkauan, home visit, pembinaan, pendekatan dan pendampingan, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan bakat minat.

Program Komunitas Taabah yakni melalui program Sekolah Gadjah Wong serta advokasi akses identitas anak terhadap jaminan pendidikan dan kesehatan sehingga anak memperoleh hak sebagai warga negara. Program Panti HAFARA adalah penerimaan di Rumah HAFARA, bimbingan motivasi dan mental, sosialisasi pemberdayaan anak jalanan, silaturahmi ke rumah singgah lain, serta pendampingan kesehatan. Program Rumah Anak Indonesia yakni panti asuhan, pengembangan spiritual, mentoring, pengembangan talenta dan bakat, english class, general cleaning, serta Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK). Program Rumah Singgah Ahmad Dahlan antara lain konseling anak dan keluarga, pengembangan bakat kesenian, pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan agama islam, serta pemagangan.

Rumah Singgah Anak Mandiri mempunyai program pelatihan life skill, pendampingan dan pengajaran, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Program RSB Diponegoro antara lain pelatihan dan penyuluhan anak, konseling anak dan orang tua, penguatan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak, aksesibilitas identitas anak, aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta bridging dan remedial course. Program Yayasan Indriya Nati antara lain penyediaan layanan perpustakaan, training dan workshop, Drop in Center, konseling, serta pendampingan keluarga. Program Yayasan Rumah Impian mencakup Hope Shelter, Education Center, Street Contacting, dan Parents Empowerment.

Pentingnya pembagian peran masing-masing *stakeholder* ini mengingat semakin kompleks permasalahan dalam sebuah kebijakan, maka semakin banyak pula aktor yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Selain itu pembagian peran sesuai dengan kemampuan serta tupoksi dilakukan untuk menghindari adanya monopoli satu aktor terhadap aktor lain. Pembagian peran yang jelas akan membuat masing-masing aktor mempunyai *bargaining position* sehingga tidak terdapat dominasi peran. Pelaksanaan tidak

hanya sekedar berjalan sesuai keinginan masing-masing aktor, tetapi terdapat sinergi antar aktor dalam menjalankan peran mereka.

Hambatan dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi DIY

Terdapat hambatan dalam di antara Dinas Sosial DIY dengan Satpol PP DIY yakni tindakan Satpol PP DIY yang cenderung tidak dilakukan dengan segera dalam merespon rekomendasi penjemputan. Selain itu, Satpol PP DIY tidak dapat melakukan penjemputan di luar jam kerja kantor. Padahal kebanyakan anak jalanan beraktivitas di luar jam kerja kantor. Meskipun demikian, mereka sudah memahami tujuan bersama sehingga tidak menjadikan itu sebagai konflik. *Stakeholder* lain juga telah memaklumi hambatan tersebut.

Selain itu, kebiasaan masyarakat yang masih suka memberi kepada anak jalanan menjadi hambatan bagi Tim Penjangkau pada penanganan anak jalanan ini. Hal ini dikarenakan kebiasaan memberi tersebut justru menyebabkan anak semakin adiktif terhadap aktivitas-aktivitas di jalanan sehingga anak tidak jera berada di jalanan.

E. PENUTUP

Proses pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan di Provinsi DIY melibatkan berbagai *stakeholder* dan tergabung dalam tim koordinasi khusus yang dibentuk sesuai amanat Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 yakni Tim Penjangkau Anak Jalanan. Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi DIY melibatkan berbagai *stakeholder* baik pemerintah maupun non-pemerintah. *Stakeholder* pemerintah yang terlibat adalah Dinas Sosial DIY dan Satpol PP DIY. *Stakeholder* non-pemerintah terdiri dari IPSM DIY, Komunitas Taabah, Panti HAFARA, Rumah Anak Indonesia, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rumah Singgah Anak Mandiri, Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro, Yayasan Indriya Nati, dan Yayasan Rumah Impian.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Purwanto (2012), interaksi antar *stakeholder* dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi DIY membentuk mekanisme kerja berkaitan (*sequential*) dimana terdapat hubungan ketergantungan antar *stakeholder* serta membentuk pola *input-output*.

Tanggung jawab dan hubungan *stakeholder* menjadi poin terpenting dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi DIY yang berkaitan dengan peran masing-masing *stakeholder* serta pola hubungan dan interaksi yang terjadi antar *stakeholder* sesuai teori yang dikemukakan oleh Salam & Noguchi (2006); dalam Zubayr et al. (2014). Pada proses pelaksanaan tidak hanya sekedar dijalankan sesuai dengan keinginan masing-masing *stakeholder*, tetapi sesuai dengan peran masing-masing *stakeholder*. Dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi DIY ini terdapat pembagian peran yang jelas sehingga membuat masing-masing *stakeholder* mempunyai *bargaining position* sehingga tidak terdapat dominasi peran satu sama lain.

Terdapat adanya kerjasama dan koordinasi yang berjalan dengan baik dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi DIY. Mereka berjalan bersama-sama dan saling bergantung satu sama lain. Hal ini didukung dengan data tren penurunan anak jalanan di Provinsi DIY pada Tahun 2011-2019. Dapat disimpulkan bahwa adanya Tim Penjangkau mampu memperkuat penanganan anak jalanan di Provinsi DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). *Strategic Management of Stakeholders : Theory and Practice*. April 2016. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001>
- Akarro, R. R. J., & Mtweve, N. A. (2011). Poverty and Its Association with Child Labor in Njombe District in Tanzania: The Case of Igima Ward. *Current Research Journal of Social Sciences*.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Alviya, I., Yosefi Suryandari, E., Maryani, R., & Muttaqin, Z. (2016). Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Wilayah Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 13(2), 121–134. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2016.13.2.121-134>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). CV Jejak. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Anggito,+A.,+%26+Setiawan,+J.+\(2018\).+Metodologi+penelitian+kualitatif.+CV+Jejak+\(Jejak+Publisher\).+&ots=5GiuqybuFm&sig=YAaNbf4mgFie8YiFmelCUvAsOew&redir_esc=y#v=onepage&q=Anggito%2C+A.%2C+%26+Setiawan%2C+J.+\(2018\).+Metodologi+penelitian+kualitatif.+CV+Jejak+\(Jejak+Publisher\).&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Anggito,+A.,+%26+Setiawan,+J.+(2018).+Metodologi+penelitian+kualitatif.+CV+Jejak+(Jejak+Publisher).+&ots=5GiuqybuFm&sig=YAaNbf4mgFie8YiFmelCUvAsOew&redir_esc=y#v=onepage&q=Anggito%2C+A.%2C+%26+Setiawan%2C+J.+(2018).+Metodologi+penelitian+kualitatif.+CV+Jejak+(Jejak+Publisher).&f=false)
- Argyle, M. (2017). *Social interaction: process and products*. Routledge.
- Astri, H. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia: faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Jurnal Aspirasi*, 5(2), 145-155.
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder Identificatixon and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
- Creswell, J. W., Lazuardi, A. L., & Qudsy, S. Z. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di Antara Lima Pendekatan* (Ed. 3). Pustaka Pelajar.
- Crombach, A., & Elbert, T. (2014). Child Abuse & Neglect The benefits of aggressive traits : A study with current and former street children in Burundi. *Child Abuse & Neglect*, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.12.003>
- Dabir, N., & Athale, N. (2011). *From Street to Hope: Faith Based and Secular Programs in Los Angeles, Mumbai and Nairobi for Street Living Children*. SAGE Publications India Pvt Ltd. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4135/9788132107651>
- Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial*.
- Dutta, N. (2018). Street Children in India: a Study on Their Access To Health and Education. *International Journal of Child, Youth and Family Studies*, 9(1), 69. <https://doi.org/10.18357/ijcyfs91201818120>
- Emilie, S. (2009). Off the radar and at risk: children on the streets in the UK. *Housing, Care and Support*, 12(3), 22–27. <https://doi.org/10.1108/14608790200900019>
- Fawzie, Z. C., & Kurniati, S. (2012). Faktor lingkungan yang membentuk konsep diri pada anak jalanan. *Jurnal Stikes*, 5(1), 21-37.
- Friberg, A., & Martinsson, V. (2017). *Problems and Solutions when Dealing with Street*. 1–54. <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1148447&dswid=-6043>
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2015). *LKPJ: Laporan Keterangan*

- Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.*
- Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (No. 1). 2012.
- Purwoko, T. (2013). Analisis faktor-faktor penyebab keberadaan anak jalanan di Kota Balikpapan. *Jurnal Sosiologi*, 1(4), 13-25.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who ' s in and why ? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Suyatna, H., Kusumasari, B., & Widianingrum, N. (2015). *Menguak Kehidupan dan Strategi Penghapusan Pekerjaan Terburuk Anak*. Gava Media.
- Syawie, M. (2011). Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. *Informasi*, 16(03), 213–219.
<http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/21f67d035eb50eff518309e438be4c8b.pdf>
- UNESCO Institute for Statistics (UIS). (2018). *One in Five Children, Adolescents and Youth is Out of School*. <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf>
- Vedung, E. (2017). *Public Policy and Program Evaluation*. Routledge.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Kx0uDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT17&dq=Vedung,+E.+\(2017\).+Public+policy+and+program+evaluation.+Routledge.&ots=GSVJmqLZmB&sig=w8OPlkXIXBn0eIXSybprYTZEVE4&redir_esc=#v=onepage&q=Vedung%2C+E.+\(2017\).+Public+policy+and+program+evaluation.+Routledge.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Kx0uDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT17&dq=Vedung,+E.+(2017).+Public+policy+and+program+evaluation.+Routledge.&ots=GSVJmqLZmB&sig=w8OPlkXIXBn0eIXSybprYTZEVE4&redir_esc=#v=onepage&q=Vedung%2C+E.+(2017).+Public+policy+and+program+evaluation.+Routledge.&f=false)
- Widodo, R. M. (2000). **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN** Implementasi Hak-Hak Dasar Anak Dalam Rangka Pengentasan Anak Jalanan Dari Eksploitasi Ekonomi (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Zubayr, M., Darusman, D., Nugroho, B., & Nurrochmat, D. R. (2014). Peranan para pihak dalam implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(3), 239-259.